



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XXVI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dan menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renja ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Kota Salatiga merupakan kota kecil dengan luas wilayah $\pm 56,78 \text{ km}^2$ yang berada di jalur strategis antara Kota Semarang dan Surakarta. Letaknya yang strategis menjadikan Salatiga sebagai kota transit, pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pendidikan. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan mobilitas penduduk dan kendaraan yang berdampak langsung pada kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dan mendasari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 antara lain:

- a. Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak seimbang dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga berpengaruh pada pencapaian keselamatan berlalu lintas melalui rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Salatiga;
- b. Belum adanya fasilitas dan sistem tentang angkutan darat yang memadai;
- c. Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk memenuhi kelayakan kendaraan bermotor;
- d. Masih terbatasnya fasilitas dan system perparkiran.

Renja Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan. Melalui Renja ini, Dinas Perhubungan Kota Salatiga berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut melalui program dan kegiatan yang terarah dan terukur.

Fungsi utama Renja Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman operasional pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Sebagai alat pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja tahunan; dan
- d. Menjamin kesinambungan capaian target pembangunan jangka menengah.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Salatiga, khususnya pada sektor transportasi dan mobilitas. Nilai strategis tersebut meliputi:

- a. Mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas di dalam kota.
- b. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta peningkatan budaya tertib berlalu lintas.
- c. Menunjang integrasi transportasi berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan regional dalam pengembangan kota hijau (*green city*).
- d. Mendorong inovasi dan digitalisasi layanan transportasi, seperti sistem parkir elektronik, manajemen lalu lintas berbasis data (*smart traffic*), dan pelayanan informasi publik berbasis aplikasi.
- e. Memberikan landasan perencanaan dan penganggaran yang efektif, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki relevansi, efisiensi, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan kondisi aktual dan potensi permasalahan yang ada, Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 disusun untuk menjadi dokumen perencanaan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan strategis guna mendukung terwujudnya *“Kota Salatiga sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia.”*

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027, adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Uji Keterampilan Pengemudi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Angkutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam

perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2027.

b. Tujuan

- 1) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2027 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
- 2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 pada periode Tahun 2027;
- 3) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2027.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang.
- I.2 Landasan Hukum.
- I.3 Maksud dan Tujuan.
- I.4 Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025
- II.2 Evaluasi Capaian SPM Dinas Perhubungan Kota Salatiga
- II.3 Permasalahan dan Isu
- II.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- II.6 Inovasi

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- III.2 Arah Kebijakan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

- IV.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- IV.2 Tematik

BAB V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusang

- V.1 Indikator Kinerja Utama
- V.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VI Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PADA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2027;

Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2025 Kota Salatiga

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15					Urusan Perhubungan									
2	15	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	84,33	88,9	84,28		0,00	88	84,92	101
2	15	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan.	100	NA	NA	NA	-	NA	84,92	85
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Perangkat Daerah).	92	87,82	84,28		0,00	88	84,92	92
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	75	NA	NA	NA	-	74,3	84,92	113

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	48	18	12	12	100,00	12	42	88
2	15	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLap oran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	28	18	9	9	100,00	9	36	129
2	15	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Capaian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100	9	12	12	100,00	12	33	33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap oran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	45	9	9	9	100,00	9	27	60
2	15	1	2	0 1	0 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	4	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	1	2	0 1	0 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	4	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Lingkup Perangkat Daerah.								
2	15	1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	NA	100	95,56		0,00	95,56	196	-
2	15	1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	158	78	49	41	83,67	46	165	104
2	15	1	2	0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	4	4	1	1	100,00	1	6	150
2	15	1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	100	100	95,56		0,00	95,56	196	196

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	344	39	49	41	83,67	46	126	37
2	15	1	2	0	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	10	1	1	1	100,00	1	3	30
2	15	1	2	0	0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD.	NA	100	95,65		0,00	95,65	196	-
2	15	1	2	0	0	3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	4	3	2	2	100,00	2	7	175
2	15	1	2	0	0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Pengamanan Barang Milik Daerah.	100	100	95,65		0,00	95,65	196	196

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	0	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	10	2	2	100,00	2	6	60
2	15	1	2	0	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	NA	100	60	60	100,00	NA	-
2	15	1	2	0	0	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya .	920	839	60	60	100,00	NA	-
2	15	1	2	0	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100	100	60	60	100,00	NA	-
2	15	1	2	0	0	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya .	2.370	459	60	60	100,00	NA	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026			
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100		
2	15	1	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.	NA	100	89,56		0,00	89,56	190	-		
2	15	1	2	0	6	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan.	4	2	1	1	100,00	1	4	100
2	15	1	2	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan (dekstop atau laptop pendukung ATCS dan administrasi kantor) Kantor yang Disediakan.	3	1	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	1	2	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4	2	1	1	100,00	1	4	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							yang Disediakan.								
2	15	1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	4	2	1	1	100,00	1	4	100
2	15	1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	4	2	1	1	100,00	1	4	100
2	15	1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan.	1460	730	730	730	100,00	356	1816	124
2	15	1	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	48	24	1	1	100,00	1	26	54
2	15	1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	48	24	1	1	100,00	1	26	54

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Konsultasi SKPD.								
2	15	1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100	100	89,56		0,00	89,56	190	190
2	15	1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan.	5	1	1	1	100,00	1	3	60
2	15	1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	5	1	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	30	1	1	1	100,00	1	3	10

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.	5	1	1	100,00	1	3	60
2	15	1	2	0	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan.	1.825	365	365	100,00	365	1095	60
2	15	1	2	0	0	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	5	12	1	100,00	1	14	280
2	15	1	2	0	0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	5	12	1	100,00	1	14	280
2	15	1	2	0	0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah	NA	NA	100	0,00	100	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Urusan Pemerintah Daerah.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.								
2	15	1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel (4 unit meja kerja dan 1 unit kursi pelayanan PKB).	5	NA	40	40	100,00	30	-	-
2	15	1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin (1 unit komputer dan 4 printer).	5	NA	NA	NA	-	6	-	-
2	15	1	2	0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit terbangun (1 unit gedung arsip, 1 unit gudang lalin).	2	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.	100	NA	100		0,00	100	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	1	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	196	NA	40	40	100,00	30	-	-
2	15	1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	44	NA	NA	NA	-	6	-	-
2	15	1	2	0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	1	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang	NA	100	85,56		0,00	85,56	186	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Pemerintahan Daerah.	Perangkat Daerah.								
2	15	1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	48	12	1	1	100,00	1	14	29
2	15	1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	48	12	1	1	100,00	1	14	29
2	15	1	2	0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	4	2	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	4	1	1	1	100,00	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100	100	85,56		0,00	85,56	186	186
2	15	1	2	0	8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	5	12	1	1	100,00	1	14	280
2	15	1	2	0	8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	5	12	1	1	100,00	1	14	280
2	15	1	2	0	8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	NA	2	1	1	100,00	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.	NA	1	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	NA	100	NA		-	94	194	-
2	15	1	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	16	8	4	4	100,00	4	16	100
2	15	1	2	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28	68	30	30	100,00	33	131	468

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
									Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan.	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.							
2	15	1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	1 unit pemeliharaan Gedung Kantor dan ruang rapat dishub.	3	2	2	100,00	1	5	167
2	15	1	2	0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	4	1	23	100,00	1	25	625
2	15	1	2	0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Pemeliharaan 1 unit pagar dishub.	1	2	1	100,00	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026		
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100	
2	15	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.	100	100	NA		-	94	194	194	
2	15	1	2	0	9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	4	4	4	4	100,00	4	12	300
2	15	1	2	0	9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	47	35	30	30	100,00	33	98	209

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	1	2	0 9	0 9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	13	1	2	2	100,00	1	4	31
2	15	1	2	0 9	1 0		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi.	137	NA	23	23	100,00	1	-	-
2	15	1	2	0 9	1 1		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi.	1	1	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	1	2	1 3			Penataan Organisasi.	NA	NA	100	90	0	0,00	NA	-	-
2	15	1	2	1 3	0 3		Peningkatan Kinerja dan	Jumlah dokumen Peningkatan	NA	2	1	0	0,00	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Reformasi Birokrasi.	Kinerja dan Reformasi Birokrasi.								
2	15	2				Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Rambu Rambu Terpasang.	95	83	89		0,00	NA	83,00	87
							Persentase layanan angkutan darat.	29	27,53	46		0,00	NA	-	-
2	15	2				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Rasio konektivitas kabupaten/kot a.	0,60		NA		-	nA	83,00	13833
							Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal kabupaten/kot a.	14,08		NA		-	8,05		
							Kinerja lalu lintas.	0,43		NA		-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota .	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a.	NA	100	100		0,00	3	103	-
2	15	2	2	0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.	3	NA	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	2	2	0	1	Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ.	6	NA	1	1	100,00	1	-	-
2	15	2	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek (Laporan Posko	12	4	NA	NA	-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Angkutan Lebaran, Posko Nataru, Wasdal LLAJ).								
2	15	2	2	0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota .	Capaian Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a.	90	100	100		0,00	3	103	114
2	15	2	2	0 1	0 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a.	5	1	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	2	2	0 1	0 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a.	5	1	1	1	100,00	1	3	60

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0 1	0 7	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota.	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota .	5	1	1	1	100,00	3	5	100	
2	15	2	2	0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota .	Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/ Kota	NA	100	95		0,00	100	200	-	
2	15	2	2	0 2	0 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun.	6	NA	NA	NA	-	NA	-	-	
2	15	2	2	0 2	0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	NA	1	NA	NA	-	6			
2	15	2	2	0 2	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	-	4	4	70	70	100,00	434	508	12700	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota .	Capaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a.	90	100	95		0,00	95	195	217
2	15	2	2	0 2	0 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a yang Terbangun.	4	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0 2	0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	NA	NA	NA	NA	-	6	-	-
2	15	2	2	0 2	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara.	749	4	70	70	100,00	434	508	68
2	15	2	2	0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Capaian Pengelolaan Terminal	NA	NA	NA		-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Penumpang Tipe C								
2	15	2	2	0 3	1 1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara (penataan dan rehab 1 unit terminal Tamansari).	3	2	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	100	NA	NA		-	NA	-	-
2	15	2	2	0 3	0 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C.	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun.	1	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0	0	3	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang).	1	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0	1	3	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang).	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara.	2	2	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0		5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	NA	100	NA	-	95	195	-
2	15	2	2	0	0	5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia.	4	3	1	1	100,00	-	-
2	15	2	2	0	0	5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian	Jumlah dokumen Lulus Uji Pengujian	16000	1000	1000	1000	100,00	3000	19

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Berkala Kendaraan Bermotor.	Berkala Kendaraan Bermotor (smartcard).								
2	15	2	2	0 5	0 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara.	39	22	8	8	100,00	10	40	103
2	15	2	2	0 5	1 0	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Laporan Monev Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Pembaruan Data KBWU).	1	NA	NA	NA	-	1	-	-
2	15	2	2	0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.	100	100	NA		-	95	195	195

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia.	1	2	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	2	2	0	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	8700	NA	1000	1000	100,00	1000	-	-
2	15	2	2	0	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara.	49	13	8	8	100,00	10	31	63
2	15	2	2	0	1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala	3	NA	NA	NA	-	1	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Kendaraan Bermotor.	Kendaraan Bermotor.								
2	15	2	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota .	Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota a.	NA	100	NA		-	100	200	-
2	15	2	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota a.	5	4	1	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan	64	23	NA	NA	-	2	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)*100
						rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.								
2	15	2	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota .	7	NA	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	2	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.	5	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0	0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	9	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota .	Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	90	100	NA		-	100	200	222
2	15	2	2	0	1	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	15	NA	1	1	100,00	NA	-	-

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
											Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0 6	1 6		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan.	48	15	1	1	0,00	2	18	38
2	15	2	2	0 6	1 7		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	69	2	1	1	100,00	NA	-	-
2	15	2	2	0 7			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupten/Kota.	Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	NA	NA	NA		-	NA	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Kabupaten/ Kota.								
2	15	2	2	0 7	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin.	Jumlah kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan.	1	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0 7	0 4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi.	4	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	NA	NA	80		0,00	90	-	-
2	15	2	2	0 8	0 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan	NA	NA	1	1	100,00	1	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Bermotor Kabupaten/Kota.	Bermotor Kabupaten/Kot a.								
2	15	2	2	0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	Capaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	100	NA	80		0,00	90	-	-
2	15	2	2	0 8	0 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kot a.	5	NA	1	1	100,00	1	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	0	0	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	4	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	0	9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Capaian Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.	NA	NA	90		0,00	100	-	-
2	15	2	2	0	9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	NA	NA	2	2	100,00	2	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	(Satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang Tersedia.								
2	15	2	2	0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Capaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a yang tersedia.	100	NA	90		0,00	100	-	-
2	15	2	2	0 9	0 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	10	NA	2	2	100,00	2	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
							Kabupaten/Kot a yang Tersedia.								
2	15	2	2	1	0	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Capaian Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kot a.	100	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	1	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	2	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
									Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						Kabupaten/Kot a yang Tersedia.								
2	15	2	2	1	1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Pemenuhan Persyaratan	NA	100	NA	NA	-	NA	-
2	15	2	2	1	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.	2	2	NA	NA	-	NA	-
2	15	2	2	1	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.	-	3	1	NA	NA	-	NA	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	1	1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Capaian Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kot a.	100	100	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	1	0 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a.	3	1	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	1	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
									Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+ 9)	11= (10/4)*100
						dalam 1 (satu) daerah.	Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a.							
2	15	2	2	1 4	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Laporan pembuatan aplikasi pendaftaran dan pembayaran retribusi non tunai pada pelayanan perizinan Angkutan Orang dalam Trayek.	1	NA	NA	NA	-	NA	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dishub Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dishub Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dishub s.d. Tahun 2026	
										Target Renja Dishub Tahun 2025	Realisasi Renja Dishub Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)*100
2	15	2	2	1	6	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota .	Capaian Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	-
2	15	2	2	1	0 6 1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen analisis tarif ekonomi. Studi <i>Ability To Pay (ATP)</i> dan <i>Willingness To Pay (WTP)</i> Tarif Angkutan Umum.	1	NA	NA	NA	-	NA	-	-

Dalam tahun anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kota Salatiga telah melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025. Dari 2 program dan 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain adalah:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Bserta Atribut Kelengkapannya.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi/Reviu Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota.
 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota:
 - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan:
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota.
5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota.
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan Atau Barang Antar Kota Salam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan Atau Barang Antar Kota Salam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota.

Hasil evaluasi terhadap Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 sampai bulan September dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja tercapai, dimana realisasi pencapaian target kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah 70,87 % yaitu dari anggaran sebesar 21.386.861.375,00 realisasinya adalah sebesar Rp. 15.157.108.451,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran Rp. 5.546.603.427,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.909.527.408,00 (70,49 %) dan Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp. 14.631.580.848,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.047.618.301,00 (68,7%).

Belanja Modal Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu anggaran Rp. 1.206.677.100,00 dan realisasi mencapai Rp. 1.201.784.850,00 (99,6%).

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;

3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan triwulan.

II.2 Evaluasi Capaian SPM Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2023-2025

Kinerja Indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas.
2. Kinerja lalu lintas Kota.
3. Rasio Izin Trayek.
4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.
5. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Indikator tersebut sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah detail capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020-2024.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Persentase Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas	Rasio	NA	NA	NA	0,71	0,71	NA	0,71	0,71	0,81	0,88	NA	NA	NA	114,08	123,94
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	NA	NA	NA	0,35	0,4	NA	0,3	0,3	0,39	0,31	NA	NA	NA	88,57	122,50
3	Rasio Izin Trayek	Rasio	NA	NA	NA	24,37	24,37	NA	NA	NA	23,31	23,52	NA	NA	NA	95,61	96,79
4	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	NA	NA	NA	24,79	22,79	NA	NA	NA	21,41	19,49	NA	NA	NA	86,37	78,62
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	NA	NA	NA	82	82	NA	NA	NA	92,23	75,44	NA	NA	NA	112,44	92,00
6	Persentase rambu-rambu terpasang	%	NA	NA	NA	77	83	NA	NA	NA	77	83	NA	NA	NA	100	100
7	Persentase layanan angkutan darat	%	NA	NA	NA	27,53	27,53	NA	NA	NA	27,53	27,53	NA	NA	NA	100	100

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Perhubungan Kota Salatiga menyajikan kinerja pelayanan berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Salatiga selama lima tahun terakhir, diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci, dengan indikator Renstra 2023-2026 menjadi dasarnya. Namun, pada periode lima tahun terakhir tersebut, terdapat dua dokumen Renstra, yaitu Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, dan Tahun 2023-2026. Hal ini menyebabkan tidak dapat selarasnya antara target dan realisasi kinerja pelayanan dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja pelayanan tersebut, sehingga data tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh, dan berdampak pada besaran persentase capaian kinerjanya yang tidak dapat diukur.

Dari tujuh indikator di atas, terdapat dua indikator yang tidak ada di Renstra 2017-2022, namun besaran realisasi capaian kinerjanya dapat disajikan. Hal ini dikarenakan dua indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021, dan 2022. Dua indikator tersebut adalah Rasio konektivitas, dan Kinerja Lalu Lintas.

Secara detail, capaian atas indikator pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rasio konektivitas

Rasio konektivitas kota pada target ini adalah “Jumlah trayek yang dilayani, dikali bobot trayek, dibagi jumlah kebutuhan trayek”. Dengan target yang sama yaitu sebesar 0,71, realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 0,81 dengan capaian kinerja sebesar 114,08%, sedangkan pada tahun 2024, terealisasi sebesar 0,88 dengan capaian kinerja sebesar 123,94%. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 9,94% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi dengan standar nasional. Standar nasional untuk rasio konektivitas kota, tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Namun, pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1. Dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 0,88 atas target sebesar 0,71, capaian ini terkategori baik dikarenakan jumlah trayek yang dilayani masih dalam jumlah dan dengan kondisi yang tidak terpaut jauh dari jumlah trayek yang dibutuhkan.

b. Kinerja lalu lintas Kota

Kinerja Lalu Lintas Kota pada target ini adalah “*V/C Rasio Ruas Jalan, dibagi jumlah jalan yang disurvei*”, Indikator ini bersifat negatif. Realisasi indikator atas kinerja lalu lintas kota pada tahun 2023 adalah sebesar 0,39 dengan capaian kinerja sebesar 88,57% atas target sebesar 0,35. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,31 dengan capaian kinerja sebesar 122,50% atas target sebesar 0,4. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 33,93% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan standar nasional, target untuk kinerja lalu lintas kota tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Namun, pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1. Dengan realisasi sebesar 0,31 atas target sebesar 0,4 dengan indikator ini bersifat negatif, capaian ini terkategori sangat baik dikarenakan berada pada nilai yang lebih kecil dari target

c. Rasio Izin Trayek

Rasio Izin Trayek pada target ini adalah “Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk”. Realisasi kinerja atas rasio izin trayek pada tahun 2023 adalah sebesar 23,31 dengan capaian kinerja sebesar 95,61% atas target sebesar 24,37. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 23,52 dengan capaian kinerja sebesar 96,79% atas target sebesar 24,37. Terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya. Standar nasional untuk rasio izin trayek tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

d. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada target ini adalah “Jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR, dibagi jumlah angkutan umum”. Tahun 2023 target sebesar 82%, realisasi kinerja atas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2023 adalah sebesar 92,23% dengan capaian kinerja sebesar 112,44%. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 75,44% dengan capaian kinerja sebesar 92%. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 20,44% dari tahun sebelumnya. Standar nasional dari persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji KIR adalah 60%, terealisasi 75,44%, tercapai dengan tingkat capaian sebesar 125,73%. Capaian ini, sangat baik.

e. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan pada target ini adalah “Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan”. Realisasi kinerja atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2023 adalah sebesar 21,41 dengan capaian kinerja sebesar 86,37% atas target sebesar 24,79. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 19,49% dengan capaian kinerja sebesar 78,62% atas target sebesar 24,79. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 7,75% dari tahun sebelumnya. Standar nasional untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, tidak ada, sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

II.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Peran transportasi sangatlah vital, mulai dari mendukung mobilitas pribadi dan pergerakan barang untuk kehidupan sehari-hari, hingga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi melalui distribusi produksi dan perdagangan. Transportasi juga berperan penting dalam rantai pasokan, menyediakan fasilitas penunjang bagi sektor-sektor lain, serta berkontribusi pada konektivitas sosial dan pemerataan Pembangunan. Di Kota Salatiga, transportasi berperan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi dan sosial, penyambung konektivitas antar wilayah, serta penggerak mobilitas penduduk dan barang/jasa. Selain itu, transportasi modern juga berperan dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi kemacetan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau oleh semua kalangan.

Berdasarkan Indikasi Program Utama yang tertuang dalam Lampiran Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan adalah:

- a. Penyusunan legalisasi Tataran Transportasi Lokal;
- b. Pemeliharaan, peningkatan dana tau pemantapan pelayanan terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe C
- c. Peningkatan pelayanan angkutan umum, meliputi:

- 1) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan daerah sekitar;
 - 2) Angkutan umum pengumpan (feeder) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani SAUM; dan
 - 3) Pengembangan BST (Bus Sistem Transit) berdasarkan kajian dan kebutuhan.
- d. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan terminal barang;
- e. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat pelayanan system angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- f. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada koridor yang menghubungkan Ungaran (simpul) dengan Salatiga (simpul);
- g. Infrastruktur Perkotaan, meliputi:
- 1) Pembuatan jalur sepeda;
 - 2) Peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki;
 - 3) Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan *Car Free Day* (CFD)
- h. Kawasan Transportasi
- 1) Peningkatan dan penetapan standart kualitas kawasan transportasi;
 - 2) Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi;
 - 3) Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)
- Berupa pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029, serta visi dan misi Kepala Daerah, beberapa permasalahan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kota Salatiga adalah:

- a. Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak seimbang dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga berpengaruh pada pencapaian keselamatan berlalu lintas melalui rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Salatiga;
- b. Belum adanya fasilitas dan sistem tentang angkutan darat yang memadai;
- c. Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk memenuhi kelaikan kendaraan bermotor; dan
- d. Masih terbatasnya fasilitas dan sistem perparkiran.

Identifikasi atas isu strategis sesuai lingkungan dinamis isu global, nasional (Renstra Kementerian Perhubungan), dan regional (Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, implikasi RTRW Kota Salatiga bagi Dinas Perhubungan, KLHS Kota Salatiga dan RPJMD Kota Salatiga, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan konektivitas Kota Salatiga.

Isu yang utama di sektor transportasi adalah konektivitas. Peran transportasi khususnya angkutan umum yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Salatiga dengan pusat aktivitas Masyarakat serta meningkatkan pelayanan umum yang nyaman dan handal. Selain itu perlu dilaksanakan rehabilitasi/ pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum.

b. Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Isu yang tidak kalah penting adalah menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan penyediaan perlengkapan jalan, penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dan upaya peningkatan kendaraan bermotor wajib uji.

Selanjutnya, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga, khususnya di tahun 2026 mendatang, antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya kinerja layanan angkutan penumpang umum yang menjangkau seluruh wilayah kota Salatiga;
- 2) Masih rendahnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum;
- 3) Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
- 4) Bertambahnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan Kota yang belum tertangani;
- 5) Rendahnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala;
- 6) Belum optimalnya kualitas perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
- 7) Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah.

Dampak atas permasalahan terhadap pencapaian visi misi Wali Kota Salatiga, tujuan, sasaran, dan program prioritas Kota Salatiga berdasarkan dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, terutama yang terkait dengan sektor transportasi terhadap target pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Dampak terhadap Visi dan Misi Wali Kota

a) Visi

Transportasi yang tidak efisien akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, sementara keselamatan yang rendah akan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kedua hal tersebut menghambat visi Wali Kota Salatiga terkait dengan pembangunan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

b) Misi

Perihal dampak terhadap misi Wali Kota Salatiga, misi yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terganggu.

2) Dampak terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

a) Sasaran 2: Terwujudnya Transformasi Sosial dan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan.

Masalah kinerja angkutan umum yang kurang menjangkau wilayah akan menghambat akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan layanan sosial. Ini akan menciptakan ketidakmerataan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b) Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital

Permasalahan internal seperti kualitas perencanaan, administrasi, dan tata kelola yang belum optimal, secara langsung bertentangan dengan tujuan ini. Tanpa perbaikan tata kelola, sulit untuk menerapkan sistem yang efisien dan akuntabel.

c) Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Masalah rendahnya sarana prasarana angkutan umum, kurangnya perlengkapan jalan, dan tidak tertanganinya daerah rawan kecelakaan (DRK) secara langsung menggagalkan pencapaian tujuan ini. Kualitas infrastruktur tidak akan merata, dan keselamatan jalan tidak akan terjamin dengan baik.

3) Dampak terhadap Program Prioritas Kota

a) Program Prioritas "*Peningkatan Kualitas Infrastruktur*"

Program ini akan sulit dicapai jika masalah-masalah teknis seperti kurangnya perlengkapan jalan dan rendahnya uji KIR tidak diselesaikan.

b) Program Prioritas "*Peningkatan Transformasi Ekonomi*"

Konektivitas yang buruk dan masalah lalu lintas akan meningkatkan biaya logistik dan menghambat pergerakan barang dan jasa, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

c) Program Prioritas "*Peningkatan Tata Kelola*"

d) Program ini akan terancam jika permasalahan internal pada perencanaan, administrasi, dan kepegawaian tidak dapat diatasi.

b. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan bidang perhubungan:

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah yang dapat menghambat dan/atau membatasi pengembangan transportasi.
- 2) Kurangnya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- 3) Perkembangan teknologi yang dapat menggantikan peran Dinas Perhubungan.
- 4) Tuntutan masyarakat akan transportasi yang murah, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses serta terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya.
- 5) Belum tertatanya sarana dan prasarana parkir yang mengutamakan konsep integrasi, efisiensi dan teknologi informasi.
- 6) Kurangnya kedisiplinan, kesadaran dan perhatian masyarakat dan operator angkutan umum akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.
- 7) Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum akibat peningkatan biaya operasional (inflasi dan fluktuasi harga bahan bakar).
- 8) Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di bidang perhubungan (fasilitas parkir dan angkutan umum).
- 9) Banyaknya pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas parkir.
- 10) Perkembangan tren penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan berbasis online yang berdampak pada kepadatan lalu lintas.
- 11) Ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap serangan siber.
- 12) Munculnya konflik sosial yang dapat mengganggu operasional dan keberlanjutan penyelenggaraan LLAJ (Penataan parkir berbasis teknologi, perubahan manajemen rekayasa lalu lintas, dan angkutan berbasis online).
- 13) Isu kejahatan dalam transportasi yang mengancam keselamatan penumpang.

- 14) Peningkatan jumlah penduduk, kendaraan dan perubahan tata guna lahan yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan bidang perhubungan:

- 1) Program pengembangan infrastruktur nasional yang mendukung peningkatan perhubungan
- 2) Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pengembangan transportasi massal.
- 3) Masih adanya minat masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi umum.
- 4) Munculnya teknologi baru dalam transportasi yang memungkinkan inovasi pelayanan penyelenggaraan LLAJ.
- 5) Penyediaan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan kompetensi pegawai perhubungan.
- 6) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.
- 7) Peningkatan peran dinas perhubungan dalam kebijakan penataan ruang daerah.
- 8) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan konektivitas perhubungan.
- 9) Pembebasan lahan yang memungkinkan pengembangan infrastruktur perhubungan.
- 10) Tuntutan transport demand membuka peluang untuk mengembangkan antar moda atau multi moda yang terintegrasi dan terkoneksi yang murah dan nyaman.
- 11) Taman kota yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran tertib berlalu lintas bagi anak-anak.
- 12) Adanya penilaian yang mendorong perbaikan sistem transportasi dan penataan angkutan (Wahana Tata Nugraha, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas, dan Pemilihan Abdi Yasa Teladan).

II.4 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan sudah disusun dan dituangkan dalam Renstra 2025-2029. Namun dalam perjalanannya, pada RKPD 2027 terdapat beberapa kegiatan yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan seperti yang tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.4.1
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Kinerja Lalu Lintas.	0,5	Indikator negatif. Nilai maksimal, 1.
			Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	8,05%	-
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,45	Nilai maksimal, 1
1	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.		Capaian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	90%	
	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Salatiga	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	5 Dokumen	
2	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Salatiga	Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Dokumen	
3	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Ruas Jalan Kota Salatiga	1 Dokumen	

Usulan POKIR 2027 Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang berasal dari tiga(3) usulan, yaitu:

- a. ID Usulan 1753274, diusulkan oleh Untung Haryanto, S.E., atas usulan “Pengadaan LPJU”. Usulan untuk di RW 2 Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga.
- b. ID Usulan 1855671, diusulkan oleh Laurens Adrian, S.T., atas usulan “Pemasangan Warning Light”. Usulan untuk di RW 9 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

- c. ID Usulan 1858863, yang diusulkan oleh Ahmad Musadad, atas usulan “Pengadaan LPJU.” Usulan untuk di RW 1 Kecandra, Sidomukti, Kota Salatiga.

II.5 Telaahan Usulan Masyarakat

Telaahan usulan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai implementasi pendekatan perencanaan partisipatif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Usulan masyarakat diperoleh melalui berbagai tahapan perencanaan, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, serta pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dihimpun dalam proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027. Seluruh tahapan tersebut menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat yang kemudian diverifikasi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, ketersediaan anggaran, serta kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. berikut tabel usulan masyarakat yang dihimpun Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027.

Tabel 2.5
Usulan Masyarakat

No	Tanggal Surat	Pengirim / Pemohon	Jenis Permohonan	Lokasi	Keterangan Tambahan	Nama File Sumber
1	22 Desember 2025	Lurah Kecandran (Nugroho Budi Raharjo, SE)	Perbaikan/ Penggantian Kaca cembung tikungan / Convex Mirror	Perempatan jalan Gedongan RT 03 RW II Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti	Rambu rusak, penting untuk keselamatan pengguna jalan (Koordinat: 7°19'26.2"S 110°28'46.3"E)	20251222144359permohonan perbaikan rambu lalin.pdf
2	21 Januari 2026	Sumanta (Ketua RT 04 RW 05 Perumahan Citra Buana)	Penggantian Cermin Cembung Jalan (Convex Mirror)	Gerbang masuk Perumahan Citra Buana RT 04 RW 05, Jl. Sultan Agung, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo	Penggantian Cermin Cembung Jalan (Convex Mirror)	20260122094539permohonan penggantian cermin cembung jalan.pdf
3	19 Januari 2026	Yosep Hardi (Ketua RT.09 RW. 04 Kelurahan Tegalrejo)	Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Komplek Pondok Aren RT.09 RW.04, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo	Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU)	20260121073416RT 09 RW IV Kec Argomulyo LPJU.pdf
4	5 January 2026	Kepala Puskesmas Sidorejo Lor	Kerucut Traffic Cone, Zebra Cross, Warning Light	Depan Puskesmas Sidorejo Lor	Antisipasi kecelakaan lalu lintas di depan fasilitas kesehatan	20260105124323surat permohonan rambu-rambu lalu lintas puskesmas sidorejo lor.pdf
5	January 2026	Ketua RW 01 Randuares (Kel. Kumpulrejo)	Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Jalan penghubung RW 01 Randuares dengan RW 02 Promasan	Meningkatkan mobilitas dan keamanan jalan sepanjang 750m	proposal lpju rw 01.pdf
6	23 February 2026	Ketua RW IX Argamas Timur (Kel. Ledok)	Lampu Peringatan & Rambu Dilarang Parkir	Pertigaan Jl. Argoboga & Jl. Argotirto	Sering terjadi kecelakaan dan parkir sembarangan mengganggu pandangan	20260223110625RW IX PERUMAHAN ARGAMAS TIMUR_0000.pdf

No	Tanggal Surat	Pengirim / Pemohon	Jenis Permohonan	Lokasi	Keterangan Tambahan	Nama File Sumber
7	23 February 2026	Direktur RS Hermina Salatiga	Penanda Jalan / Zebra Cross	Area penyeberangan pintu masuk RS Hermina Salatiga (Jl. Fatmawati)	Untuk keamanan pasien menyeberang di jalur cepat provinsi	20260224081727HERMINA_0000.pdf
8	30 March 2026	Lurah Dukuh & Ketua RT 06 RW V Karangalit	Pita Kejut / Sarana Keselamatan Lalu Lintas	Jl. Arjuna RT 06 RW V Karangalit (Depan RM Dhe Sri)	Sering terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi	20260330112907Kelurahan Dukuh.pdf
9	March 2026	Ketua RT 01 & Ketua RW 04 (Kel. Tingkir Tengah)	Cermin Cembung (2 unit)	Jalan lingkungan Payaman RT 01 RW 03	Mengatasi tikungan tajam dan terbatasnya jarak pandang	20260313095231RT01 RW03 Kelurahan Tingkir Tengah.pdf
10	22 April 2026	Plt. Kepala Sekolah SDN Sidorejo Lor 01	Zona Selamat Sekolah, Rambu-rambu Lalu Lintas, Cone (4), Water Barrier (4)	Jl. Diponegoro sekitar SDN Sidorejo Lor 01	Meningkatkan keselamatan penyeberangan siswa di jalur padat	20260430111715SD N SIDOREJO LOR 01 SALATIGA.pdf
11	7 April 2025	Ketua RT 03 RW 07 Magersari (Kel. Tegalrejo)	Pembatas Jalan, Penerangan, Cermin Cembung	Persimpangan Jl. Jodipati, Sumatera, Jawa dan Kalimantan (Bawah gapura)	Rawan kecelakaan saat jam sibuk dan gelap saat malam	20260421073939RT03RW07 MAGERSARI Penerangan dan Pembatas Jalan.pdf
12	8 June 2026	Ketua RW 08 Perum Tingkir Indah (Kel. Tingkir Lor)	Marka Kejut	Perempatan dalam Perum Tingkir Indah	Untuk keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki	20260609095247permohonan Marka Kejut.pdf

No	Tanggal Surat	Pengirim / Pemohon	Jenis Permohonan	Lokasi	Keterangan Tambahan	Nama File Sumber
13	13 July 2026	Ketua RT 08 & Ketua RW 03 Gendongan	Cermin Cembung (2 unit)	Pertigaan Jl. Perengrejo & Tanggulayu, Pertigaan Jl. Tanggulayu & Kaplingrejo	Jarak pandang sangat terbatas (blind spot)	20260722151259Permohonan Bantuan Pengadaan cermin Tikungan (Convex Mirror).pdf
14	20 juli	ketua RT 05 RW 06 dusun Gamol, Kel Kecandaran	pemeliharaan cermin tikung	RT 05 RW 06 dusun Gamol, Kel Kecandaran	Rusak akibat puting beliung	Surat Permohonan cermin tikung(bersurat fisik ke kantor

II.6 Inovasi Bidang Urusan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga serta arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027, Dinas Perhubungan terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan penyelenggaraan transportasi.

Pengembangan inovasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi layanan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan. Inovasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. berikut table Inovasi pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

Tabel 2.6.1
Usulan Inovasi Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Nama Inovator	Inovasi
1.	Mochamad Codroi, A.Md.LLAJ	I-PKB Optimalisasi Layanan Informasi Alur Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Membuat Feed dan Video Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga
2.	Putri Wahyu Bintari, A.Md.PKB	SANG APC Optimalisasi Sosialisasi Informasi Pemasangan Sticker Alat Pemantul Cahaya (APC) pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Dinas Perhubungan Kota Salatiga

3.	Ulya Ddarajati, A.Md.T	PELAPAA Optimalisasi Laporan Persediaan Pakai Habis dengan Menggunakan Google Spreadsheet di Dinas Perhubungan
4.	Prila Asih Pratiwi, S.ST	QUPAKSA Qr-Code untuk Pengawasan Angkutan Salatiga
5.	Mahendra Novianto, A.Md.Tra	DIGBAS Pemanfaatan Google Spreadsheet untuk Database Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Salatiga
6.	Devankhi Arbian Pangсах, A.Md.Tra	SI PERJAL Pembuatan Database Berbasis Google Spreadsheet untuk Monitoring Rambu Jalan di Kota Salatiga
7.	Widdy Prasetyowati, S.Tr.Tra	PELANGI Peningkatan Pelayanan Perpanjangan Izin Trayek Berbasis Online Menggunakan Google Form di Dinas Perhubungan Kota Salatiga
8.	Ersyad Maulana Pradipta, S.Tr.Tra	SI ANDAL Efisiensi Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas menggunakan Link Tree pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga
9.	Ida Umi Purwanti, A.Md	OPERA DISHUB Standar Operasional Prosedur (SOP) Kearsipan sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Arsip di Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Tabel 2.6.2
Inovasi Yang sudah disahkan oleh SK Kepala Dinas
Perhubungan Kota Salatiga

No	Nama Inovasi
1.	SI DOL SLAMET Sinau Lan Dolan Bareng Keselamatan Berlalu Lintas
2.	QUPAKSA Qr-Code untuk Pengawasan Angkutan Salatiga
3.	SI ANDAL Efisiensi Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas menggunakan Link Tree pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga
4.	JUPITER Optimalisasi Penanganan Juru parker Liar Di Kawasan Zona Parkir Tengah Jalan Jendral Sudirman Dengan Teknologi Qr Code Pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA

III.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga

a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Salatiga seperti dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga periode 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis urusan Perhubungan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik,
Dinamis
dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Bergerak

Kata “Bergerak” dalam rumusan visi Pembangunan Kota Salatiga bermakna berbagai bentuk Upaya, ikhtiar dan usaha segenap pemangku kepentingan Kota Salatiga antara pemerintah, Masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, sektor swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan, Bersama dalam harmoni kemitraan berpartisipasi, aktif menjadi bagian dari derap Pembangunan Kota Salatiga.

Di Tengah arus transformasi sosial regional dan nasional, para pemangku kepentingan, berkolaborasi mengambil peran-peran sosial, budaya, ekonomi, dan politik sesuai kapasitas yang dimiliki mewujudkan profil warga kota yang produktif, Sejahtera, harmonis dan berkemajuan. Aktualisasi peran, keteladanan dan harmonisasi kepemimpinan sosial dari berbagai ragam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, diyakini menjadi kunci untuk terwujudnya bergeraknya Pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata.

b. Energik

“Energik” menggambarkan setiap warga Masyarakat Kota Salatiga memiliki Tingkat kesejahteraan, karakter kerja, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah.

Kualitas SDM yang tinggi menjadi soko guru memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Kota Salatiga yang energik ditandai dengan indeks Pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma Pembangunan yang inklusif – adil dan merata sampai tidak ada lagi penduduk Kota Salatiga hidup di bawah garis kemiskinan. Gerbang menuju cita-cita demikian setidaknya telah terbuka dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

c. Dinamis

“Dinamis” dalam tema visi Pembangunan daerah menggambarkan karakter tata Kelola pemerintahan Kota Salatiga yang aktif menggerakkan segenap potensi moril dan materiil Kota Salatiga mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan pencapaian target-target Pembangunan daerah. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis ditandai dengan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki. Pemerintahan kota yang terus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Keniscayaan kualitas tata Kelola pemerintahan kota Salatiga yang dinamis, selain ditentukan oleh efektivitas reformasi birokrasi, juga berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan *Pentahelix* (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

d. Adaptif

“Adaptif” adalah kemampuan Pemerintah Kota Salatiga dan masyarakatnya yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di Tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan disrupsi teknologi. Performa adaptif dicerminkan dengan berkembangnya berbagai inovasi kebijakan dan pelayanan publik yang tidak hanya bergantung dari kapasitas aparatur Pemerintah Kota Salatiga, tetapi seiring dengan dukungan berbagai elemen Masyarakat penggerak Pembangunan.

Kapasitas inovasi yang tinggi, tentu akan memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional. Di sinilah titik strategis bagaimana kualitas daya

dukung lingkungan hidup mutlak dibutuhkan. Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, *agile* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan Generasi Milenial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam Pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan.

e. Salatiga yang Mendunia

Salatiga Kota “mendunia” berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota “mendunia” juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi Pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (*borderless*)

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi Pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, ketrampilan dan kesehatan
- b. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM
- c. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetisi sumber daya aparatur
- d. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum
- e. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang

disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional. Pencapaian visi dan misi ditetapkan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan 1:

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga.

b. Tujuan 2:

Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
- 3) Meningkatnya kondusifitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi.

c. Tujuan 3:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital, dengan sasaran, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima.

d. Tujuan 4:

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Pembangunan infrastruktur daerah yang merata;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan Masyarakat yang adaptif dan inovatif.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Salatiga 2025 – 2029, Dinas Perhubungan Kota Salatiga merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Sebagai upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal, sekaligus berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga secara keseluruhan, tujuan Renstra

Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah, *“Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga”*.

b. Indikator Tujuan

Indikator tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT), yang merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran, dengan rumus:

$$IKLT = \frac{\text{Rata-rata capaian indikator positif} + \text{Capaian indikator negatif}}{2}$$

Contoh:

$$IKLT = \frac{\text{Rata-rata capaian indikator positif} + \text{Capaian indikator negatif}}{2}$$

$$IKLT = \frac{((\text{Capaian Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR} + \text{Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C} + \text{Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota})/3) + \text{Capaian Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.}}{2}$$

$$IKLT = \frac{((60\% + 58\% + 70\%)/3) + (1-80\%)}{2}$$

$$IKLT = \frac{((0,590+ 0,580 + 0,070)/3) + (1-0.8)}{2}$$

$$IKLT = \frac{(1,26/3) + 0,2}{2}$$

$$IKLT = \frac{0,42+0,2}{2}$$

$$IKLT = 0,31$$

b. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Sasaran merupakan kondisi spesifik yang akan dicapai sebagai hasil atau outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran adalah indikator terukur yang menunjukkan kemajuan menuju Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu *“Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga”*, maka ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga

adalah **“Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.”**

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR, Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, dan menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan. Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Salatiga beserta indikator kinerjanya, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi yang aman, merata, dan berkelanjutan di Kota Salatiga.		Indeks Kualitas Layanan Transportasi (IKLT).	0,21	0,31	0,42	0,54	0,65	0,71	Indikator positif
	Meningkatnya konektivitas pelayanan angkutan umum, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan Uji KIR.	59%	60%	61%	62%	63%	64%	Indikator positif
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C.	58%	58%	64%	70%	73%	79%	Indikator positif
		Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	7%	8,05%	9,26%	10,65 %	12,24 %	14,08%	Indikator positif
		Menurunnya jumlah lokasi rawan kecelakaan.	100%	80%	60%	40%	20%	10%	Indikator negatif

III.2 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Salatiga

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan sektor transportasi darat, yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, dapat dikelompokkan menjadi tiga fokus utama:

1. Konektivitas, Integrasi, dan Pelayanan Publik

Arah kebijakan ini bertujuan menjadikan transportasi darat sebagai tulang punggung mobilitas yang terjangkau dan efisien, serta mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional (hilirisasi dan industrialisasi).

a) Pengembangan Transportasi Perkotaan dan Kewilayahan (AK.5, Misi 6).

Prioritas utama adalah membangun sistem transportasi di perkotaan yang terintegrasi, andal, dan terjangkau (misalnya melalui Bus Sistem Transit/BST).

b) Penguatan Konektivitas dan Keterpaduan (AK.1, AK.2, Misi 5, Sasaran 4).

Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengintegrasikan berbagai moda transportasi (darat, rel, laut, udara) secara kesisteman untuk efisiensi logistik.

c) Peningkatan Kinerja Pelayanan (Sasaran 5).

Fokus pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik agar lebih handal, inklusif, dan berdaya saing sesuai standar pelayanan minimal.

d) Penurunan Biaya Logistik (Sasaran 3).

Menggunakan transportasi darat yang efisien sebagai alat untuk menurunkan total biaya logistik nasional.

2. Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan

Prioritas ini memastikan sektor transportasi darat bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan dan kelestarian lingkungan.

a) Optimalisasi Keselamatan Lalu Lintas (AK.6, Sasaran 6).

Peningkatan implementasi kebijakan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk penanganan daerah rawan kecelakaan, pemenuhan perlengkapan jalan, dan pengetatan uji kelaikan kendaraan.

- b) Transportasi Ramah Lingkungan (Misi 8, Sasaran 1).

Transisi menuju transportasi rendah karbon untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Ini mencakup pengembangan kendaraan listrik dan bahan bakar bersih.

- c) Peningkatan Stok Infrastruktur (Sasaran 2).

Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi (terminal, jalan, fasilitas non-motor) yang merata dan tahan terhadap perubahan iklim.

3. Tata Kelola, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia

Fokus ini adalah perbaikan internal untuk menciptakan pelayanan yang modern dan adaptif.

- a) Modernisasi Sistem Pelayanan (AK.3, Misi 4).

Mengadopsi teknologi digital (*Intelligent Transport System/ITS*) untuk manajemen lalu lintas, layanan publik, dan pengawasan yang lebih efisien.

- b) Peningkatan Kualitas SDM dan Kebijakan (Sasaran 7, Sasaran 8).

Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi yang kompeten dan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

- c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Misi 7, Sasaran 9).

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan adaptif di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Analisis arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional menunjukkan bahwa Tupoksi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Salatiga merupakan ujung tombak implementasi agenda transportasi nasional di tingkat perkotaan. Prioritas nasional tersebut memberikan mandat, legitimasi, dan arah yang jelas bagi Dishub Salatiga untuk menyelesaikan permasalahan lokalnya. Berikut adalah analisis keterkaitan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dishub Kota Salatiga:

1. Prioritas Konektivitas, Integrasi, dan Pelayanan Publik

- a) Pengembangan Transportasi Perkotaan dan Kewilayahan (Misi 6).

Ini merupakan tugas pokok, dan fungsi utama Dishub, bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan angkutan umum perkotaan. Prioritas ini mewajibkan Dishub untuk mengatasi masalah atas masih kurangnya kinerja layanan angkutan penumpang umum yang menjangkau seluruh wilayah

Kota Salatiga, dan permasalahan masih rendahnya sarana dan prasarana angkutan penumpang umum.

- b) Peningkatan Kinerja Pelayanan & Penurunan Biaya Logistik (Sasaran 3, 5).

Dishub harus memastikan Salatiga berfungsi optimal sebagai simpul transportasi. Konektivitas yang buruk akan menjadi sebuah masalah, dan secara langsung menghambat penurunan biaya logistik dan kualitas pelayanan.

- c) Transportasi Inklusif dan Berkeadilan (Misi 1).

Mendorong Dishub untuk tidak hanya fokus pada angkutan bermotor, tetapi juga mengembangkan transportasi berbasis non-motor (jalur pejalan kaki dan pesepeda) yang adil bagi semua warga.

2. Prioritas Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan

- a) Optimalisasi Keselamatan LLAJ (Sasaran 6).

Ini adalah prioritas kritis. Dishub Salatiga wajib mengatasi masalah Bertambahnya kejadian kecelakaan pada DRK dan Rendahnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala. Prioritas nasional menuntut Dishub untuk memfokuskan alokasi anggaran pada pemenuhan perlengkapan jalan sebagai tindakan preventif.

- b) Menurunnya Emisi GRK Transportasi (Sasaran 1) & Transportasi Ramah Lingkungan (Misi 8).

Dishub harus memastikan aspek emisi gas buang menjadi kriteria utama dalam uji kelaikan. Selain itu, Tupoksi Dishub dalam perencanaan transportasi harus mengarah pada pengembangan moda rendah emisi.

- c) Meningkatnya Stok Infrastruktur (Sasaran 2).

Memberikan mandat kepada Dishub untuk secara konsisten memperbaiki dan menambah sarana transportasi yang rusak atau kurang memadai.

3. Prioritas Tata Kelola, Teknologi, dan SDM

- a) Modernisasi Sistem Pelayanan & Peningkatan Tata Kelola (Misi 7, AK.3).

Prioritas ini adalah solusi langsung untuk mengatasi masalah atas belum optimalnya kualitas perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, serta permasalahan belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas

Pemerintah.

b) Peningkatan Kualitas SDM (Misi 4).

Mengharuskan Dishub untuk meningkatkan kompetensi pegawainya, yang merupakan bagian dari solusi untuk masalah tata kelola yang belum optimal.

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional menyediakan kerangka kerja dan dukungan yang kuat bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk mengubah permasalahan lokal menjadi peluang strategis. Seluruh kegiatan Dishub di Salatiga harus diorientasikan untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, khususnya dalam bidang Keselamatan, Konektivitas Perkotaan, dan Keberlanjutan.

B. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah di sektor transportasi darat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, umumnya berfokus pada penyelesaian isu-isu regional seperti kemacetan, tingginya angka kecelakaan, dan kurangnya konektivitas antar wilayah. Prioritas ini menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok, dan fungsinya.

1. Peningkatan Konektivitas dan Keterpaduan Jaringan Regional

Prioritas ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam menghubungkan kawasan-kawasan strategis di Jawa Tengah dan memastikan kelancaran arus logistik.

a) Arah Kebijakan: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah dan antar pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.

b) Prioritas Pembangunan:

1) Optimalisasi Jaringan Jalan Provinsi

Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan provinsi untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang.

2) Pengembangan Simpul Transportasi Terpadu

Penguatan fungsi terminal dan simpul transportasi lainnya sebagai pusat pertukaran moda yang efisien, baik untuk penumpang maupun logistik.

3) Fasilitasi Logistik Regional

Mendukung pengembangan infrastruktur logistik darat untuk menekan biaya transportasi dan mendukung hilirisasi.

2. Optimalisasi Angkutan Umum dan Keselamatan LLAJ

Prioritas ini ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi dan menekan angka kecelakaan di jalan-jalan provinsi.

- a) Arah Kebijakan: Mewujudkan Angkutan Umum Massal yang Andal dan menjamin keselamatan perjalanan transportasi.
- b) Prioritas Pembangunan:
 - 1) Optimalisasi Angkutan Umum Massal: Pengembangan dan operasionalisasi angkutan umum perkotaan dan antarkota (seperti pengembangan layanan Bus Rapid Transit/BRT atau Bus Sekolah) untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan.
 - 2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas: Melakukan intervensi di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK), khususnya di jalan provinsi dan perlintasan sebidang, melalui pemasangan perlengkapan jalan dan rekayasa lalu lintas.
 - 3) Pengendalian Transportasi Berbasis Non-Motor: Mendorong pembangunan dan pemanfaatan jalur sepeda dan pejalan kaki sebagai bagian dari solusi mobilitas berkelanjutan.

3. Tata Kelola, Teknologi, dan Dukungan Anggaran

Prioritas ini menekankan pentingnya manajemen yang efisien dan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan program.

- a) Arah Kebijakan: Peningkatan Tata Kelola Sektor Transportasi yang adaptif dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.
- b) Prioritas Pembangunan:
 - 1) Pemanfaatan Teknologi
Mendorong adopsi Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System/ITS*) untuk manajemen lalu lintas yang lebih efisien dan modernisasi pelayanan.
 - 2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Mengatasi keterbatasan anggaran di sektor transportasi melalui skema pendanaan yang inovatif dan memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran operasional.
 - 3) Transportasi Berkelanjutan
Menyusun kebijakan yang mendukung transisi ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan isu global penurunan emisi GRK.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah di

sektor transportasi darat berfungsi sebagai mandat regional yang mengarahkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Dishub Salatiga berperan sebagai simpul pelaksanaan prioritas provinsi di tingkat kota. Berikut ini adalah analisis keterkaitan prioritas provinsi dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Salatiga:

1. Mobilitas Regional dan Perkotaan

Prioritas provinsi untuk Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Optimalisasi Angkutan Umum Massal, secara langsung menetapkan peran Kota Salatiga dalam:

a) Peningkatan Konektivitas Antarwilayah.

Dishub Salatiga wajib memastikan terminal Tipe C dan jaringan angkutan kotanya terintegrasi secara fisik dan layanan dengan jaringan angkutan regional (AKDP) Jawa Tengah.

b) Optimalisasi Angkutan Umum Massal.

Prioritas ini membenarkan dan mendorong program lokal Dishub Salatiga, seperti pengembangan BST, sebagai upaya kolektif provinsi untuk mengendalikan kemacetan dan mengatasi rendahnya kinerja layanan angkutan umum di Salatiga.

c) Pengembangan Angkutan Berbasis Non-Motor.

Dishub Salatiga dituntut untuk mengalokasikan ruang milik jalan (Rumija) bagi pembangunan jalur sepeda dan pejalan kaki agar sejalan dengan agenda mobilitas berkelanjutan provinsi.

2. Keselamatan dan Kualitas Prasarana

Prioritas provinsi dalam Peningkatan Keselamatan LLAJ dan Optimalisasi Jaringan Jalan Provinsi sangat krusial bagi Tupoksi Dishub Salatiga.

a) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas.

Dishub Salatiga mendapat mandat untuk memfokuskan upaya pada penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dan memastikan pemenuhan perlengkapan jalan—sebuah masalah yang saat ini terkendala anggaran.

b) Penguatan Kualitas Jalan Provinsi.

Dishub Salatiga bertugas memastikan kelaikan jalan dan rambu lalu lintas, guna menekan angka kecelakaan regional.

c) Peningkatan Uji Kelaikan.

Prioritas keselamatan regional, menuntut Dishub Salatiga untuk meningkatkan pengawasan agar jumlah kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala, tidak lagi rendah.

3. Tata Kelola dan Efisiensi Anggaran

Prioritas provinsi dalam Peningkatan Tata Kelola Sektor Transportasi dan penyelesaian masalah Keterbatasan Anggaran memberikan dukungan untuk perbaikan internal Dishub Salatiga.

a) Arah Kebijakan

Prioritas provinsi menjadi landasan bagi Dishub Salatiga untuk mengadopsi teknologi (*ITS*) dan meningkatkan kualitas administrasi. Hal ini bertujuan mengatasi masalah internal Dishub terkait belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas.

b) Strategi Anggaran

Permasalahan keterbatasan anggaran di tingkat lokal juga merupakan isu provinsi. Dishub Salatiga harus menyelaraskan programnya dengan prioritas provinsi agar dapat menarik dukungan pendanaan dari provinsi atau merumuskan skema anggaran yang lebih efisien.

Berdasarkan telaahan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga berperan sebagai pelaksana kebijakan keselamatan dan angkutan perkotaan yang diselaraskan dengan agenda konektivitas dan pembangunan regional Provinsi Jawa Tengah. Kegagalan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyelesaikan permasalahan internal dan operasional pada urusan perhubungan, akan berdampak pada tingkat capaian prioritas transportasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA

IV.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Salatiga

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Salatiga pada tahun 2026 dirumuskan berdasarkan beberapa faktor, yaitu antara lain adalah hasil telaah kebijakan nasional, telaah tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, telaah tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2026. Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Salatiga
Tahun 2027

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.281.395.476,-
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.000.000,-
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.000.000,-
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,-
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.234.145.476,-
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.703.686.802,-
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	530.458.674,-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,-
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000,-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	142.500.000,-
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.	142.500.000,-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.250.000,-
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,-
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.000.000,-
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.000.000,-
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.250.000,-
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,-
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.000.000,-
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	70.000.000,-
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.000.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	500.000.000,-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.500.000,-
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,-
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.000.000,-
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000,-
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.000.000,-
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,-
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000,-
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.557.618.770,30
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	700.000.000,-
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	200.000.000,-
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota	500.000.000,-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.897.234.140,-
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	10.897.234.140,-
	Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Kota Salatiga	1.000.000.000,-
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	742.500.000,-
	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe C	150.000.000,-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	592.500.000,-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	261.500.000,-
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62.500.000,-
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	199.000.000,-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.786.384.630,30

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.333.333,30
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	3.312.590.945,-
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	433.460.352,-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	25.000.000,-
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	20.000.000,-
	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.000.000,-
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,-
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,-

Beberapa faktor dan rumusan tersebut, kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, ditempuh melalui 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang berindikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,33 ini terdiri dari 7 kegiatan, dengan 19 subkegiatan, yang terinci sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu; dan
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Pengadaan Mebel; dan
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Program yang berindikator Persentase Rambu-Rambu Terpasang sebesar 95%, dan Persentase layanan angkutan darat sebesar 29% ini terdiri dari 6 kegiatan dan 14 subkegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan subkegiatan:
 - a) Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; dan
 - b) Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan:
 - a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; dan
 - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan subkegiatan:
 - a) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - a) Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
 - c) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS); dan
 - d) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 5) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan subkegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.
- 6) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil analisis kebutuhan atas jumlah program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu indikatifnya, sesuai dengan RKPD 2027, yaitu terdiri dari 2 program, 13 kegiatan, 33 subkegiatan, dan pagu indikatif sebesar sebesar Rp19.452.258.287,00 yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut merupakan prioritas nasional *“Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan”* dan prioritas daerah *“Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan dan Berintegritas dan Dinamis, Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga, dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi”* dengan kelompok sasaran, Masyarakat Kota Salatiga.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta besaran pagu indikatif Dinas Perhubungan Kota Salatiga pada tahun 2026, dan pada tahun perkiraan maju, yaitu tahun 2027, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2028	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Perhubungan			21.612.178.041,00					24.066.640.643,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.328.362.041,00					23.776.640.643,00
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21.328.362.041,00					23.776.640.643,00
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.381.666.878,00					7.965.371.423,00
			-	-	8.381.666.878,00				-	7.965.371.423,00
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.547.689,00			-		14.000.000,00
		-			5.547.689,00			-		14.000.000,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5.547.689,00				-	14.000.000,00
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.547.689,00					14.000.000,00

		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	5.547.689,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	14.000.000,00
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.869.877.641,00			-	7.187.121.523,00
		-			6.869.877.641,00			-	7.187.121.523,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	625.000.000,00			-	630.000.000,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	6.244.877.641,00			-	6.557.121.523,00
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.244.877.641,00				6.557.121.523,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.244.877.641,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6.557.121.523,00
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			625.000.000,00				630.000.000,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	625.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	630.000.000,00
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.328.000,00			-	0,00
		-			36.328.000,00			-	0,00
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	36.328.000,00			-	0,00
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			36.328.000,00				0,00
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	36.328.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	0,00

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			147.332.500,00			-		150.000.000,00
		-			147.332.500,00			-		150.000.000,00
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	147.332.500,00				-	150.000.000,00
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			147.332.500,00					150.000.000,00
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	147.332.500,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			406.016.100,00			-		125.000.000,00
		-			406.016.100,00			-		125.000.000,00
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.110.000,00				-	0,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000,00				-	0,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	205.366.000,00				-	0,00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	59.838.900,00				-	0,00
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	108.912.200,00				-	110.000.000,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.000.000,00				-	0,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	14.789.000,00				-	15.000.000,00
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000.000,00					0,00

		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.789.000,00					15.000.000,00
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.789.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59.838.900,00					0,00
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.838.900,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			108.912.200,00					110.000.000,00
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	108.912.200,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	110.000.000,00
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.110.000,00					0,00
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	1.110.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00					0,00
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			205.366.000,00					0,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	205.366.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00

	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			341.014.136,00			-		359.205.900,00
		-			341.014.136,00			-		359.205.900,00
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	59.205.900,00				-	59.205.900,00
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	281.808.236,00				-	300.000.000,00
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			59.205.900,00					59.205.900,00
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	59.205.900,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	59.205.900,00
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			281.808.236,00					300.000.000,00
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	281.808.236,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	300.000.000,00
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.891.400,00			-		105.044.000,00
		-			140.891.400,00			-		105.044.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	102.544.000,00				-	102.544.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	36.347.400,00				-	0,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.000.000,00				-	2.500.000,00
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00					2.500.000,00
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.500.000,00

	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			102.544.000,00					102.544.000,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	102.544.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	102.544.000,00
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.347.400,00					0,00
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.347.400,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			434.659.412,00			-		25.000.000,00
		-			434.659.412,00			-		25.000.000,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	200.000.000,00				-	0,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	102.992.800,00				-	0,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	29.370.000,00				-	25.000.000,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	102.296.612,00				-	0,00
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			102.992.800,00					0,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	102.992.800,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00

			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00					0,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29.370.000,00					25.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	29.370.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.000.000,00
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			102.296.612,00					0,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.296.612,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			12.946.695.163,00					15.811.269.220,00
			-	-	12.946.695.163,00				-	15.811.269.220,00
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1.039.790.200,00			-		1.050.769.220,00
		-			1.039.790.200,00			-		1.050.769.220,00
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	59.790.200,00				-	65.769.220,00
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	980.000.000,00				-	985.000.000,00

	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			59.790.200,00					65.769.220,00
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.790.200,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	65.769.220,00
	2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			980.000.000,00					985.000.000,00
		Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	980.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	985.000.000,00
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			9.850.004.963,00			-		12.800.000.000,00
		-			9.850.004.963,00			-		12.800.000.000,00
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	9.850.004.963,00				-	12.800.000.000,00
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			9.850.004.963,00					12.800.000.000,00
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	472 Unit	9.850.004.963,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	12.800.000.000,00
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			737.500.000,00			-		600.000.000,00
		-			737.500.000,00			-		600.000.000,00
			Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	-	150.000.000,00				-	0,00
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	587.500.000,00				-	600.000.000,00

	2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C			150.000.000,00					0,00
		Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	30 Unit	150.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			587.500.000,00					600.000.000,00
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	587.500.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	600.000.000,00
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			180.000.000,00			-		202.500.000,00
		-			180.000.000,00			-		202.500.000,00
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	50.000.000,00				-	62.500.000,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-	130.000.000,00				-	140.000.000,00
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			50.000.000,00					62.500.000,00
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	50.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	62.500.000,00
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			130.000.000,00					140.000.000,00
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	130.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	140.000.000,00
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.089.400.000,00			-		1.095.000.000,00

		-			1.089.400.000,00			-		1.095.000.000,00
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-	100.000.000,00				-	105.000.000,00
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-	989.400.000,00				-	990.000.000,00
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			989.400.000,00					990.000.000,00
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	989.400.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	990.000.000,00
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			100.000.000,00					105.000.000,00
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	105.000.000,00
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			10.000.000,00			-		15.000.000,00
		-			10.000.000,00			-		15.000.000,00
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	10.000.000,00				-	15.000.000,00

	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			10.000.000,00					15.000.000,00
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00			-		48.000.000,00
		-			40.000.000,00			-		48.000.000,00
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	40.000.000,00				-	48.000.000,00
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00					48.000.000,00
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	40.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	48.000.000,00
	X				283.816.000,00					290.000.000,00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			283.816.000,00					290.000.000,00
3.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			283.816.000,00					290.000.000,00
			-	-	283.816.000,00				-	290.000.000,00

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			283.816.000,00			-		290.000.000,00
		-			283.816.000,00			-		290.000.000,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	283.816.000,00				-	290.000.000,00
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			283.816.000,00					290.000.000,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	283.816.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	290.000.000,00
	J U M L A H				21.612.178.041,00					24.066.640.643,00

IV.2 Tematik

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tema pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 serta mendukung pelaksanaan kegiatan tematik lintas perangkat daerah. Pendekatan tematik dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan melalui sinergi antarurusan pemerintahan sehingga setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, konektivitas wilayah, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga yang menempatkan pengembangan sistem manajemen transportasi cerdas, peningkatan keselamatan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Secara tematik, dukungan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 meliputi:

Tabel 4.2
Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kegiatan Tematik

Tema Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Dinas Perhubungan	Program/Kegiatan Pendukung
Penguatan Infrastruktur Berkualitas	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, peningkatan keselamatan jalan, optimalisasi rekayasa lalu lintas	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	Edukasi keselamatan, audit keselamatan jalan, evaluasi daerah rawan kecelakaan, pemasangan rambu dan marka	Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Inspeksi dan Audit Keselamatan Jalan
Penguatan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perhubungan dan pelayanan transportasi yang mudah diakses masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Daerah	Mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan kawasan ekonomi	Pengaturan lalu lintas, pengendalian parkir, penyediaan fasilitas transportasi
Kota Layak Anak dan Inklusivitas	Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), fasilitas penyeberangan, perlengkapan jalan di sekitar sekolah, fasilitas bagi penyandang disabilitas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan serta Rekayasa Lalu Lintas
Pengurangan Emisi dan Pembangunan Berkelanjutan	Pengelolaan transportasi yang efisien, pengurangan kemacetan, mendukung transportasi ramah lingkungan	Manajemen Lalu Lintas dan Pengembangan Transportasi Berkelanjutan

Selain mendukung tema pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2027 juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang tangguh, penanganan perubahan iklim melalui transportasi yang lebih efisien, serta peningkatan keselamatan pengguna jalan.

Seluruh dukungan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif bersama perangkat daerah terkait, Kepolisian, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan transportasi sekaligus mendukung terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota yang aman, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dengan kemampuan anggaran dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, maka ditetapkan pagu indikatifnya sebesar Rp 21.612.178.041,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) untuk mendukung capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan 2 (dua) program, yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan subkegiatan beserta kebutuhan dana pagu indikatif tersebut, sebagaimana yang dicetak dari hasil penginputan pada aplikasi web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terlampir.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 adalah

1. Presentase Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan Uji Kir;
2. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C;
3. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota;
4. Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).

Capaian kinerja Dinas Perhubungan diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025 dan capaian Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Salatiga

No	Indikator	SPM/standar nasional	Jenis Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	Persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan Uji KIR.	Σ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan Uji KIR	IKU	59	60	61	62	52	52,50	52,75	53	
		Σ Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)										
2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C.	Σ Fasilitas penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	IKU	58	58	64	70	57	58	64	70	
		Σ Fasilitas penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C sesuai SPM										
3	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota.	Σ Ruas jalan kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal	IKU	7,00	8,05	9,25	10,65	7,00	8,05	9,25	10,65	
		Σ Ruas jalan kewenangan Kota										

No	Indikator	SPM/standar nasional	Jenis Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
4	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).	Σ Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang	IKU	44,50	55	66	77	44,50	55	66	77	
		Σ Kebutuhan fasilitas keselamatan LLAJ										
5	Rasio Konektivitas Kota.	Σ Trayek yang dilayani x Bobot trayek	IKK	0,40	0,45	0,50	0,55	0,45	0,45	0,50	0,55	
		Σ Kebutuhan trayek										
6	Kinerja Lalu Lintas Kota.	$V/C \text{ Rasio} = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas Lalu Lintas}}$	IKK	0,35	0,45	0,44	0,44	0,23	0,25	0,40	0,40	

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan adalah capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penjelasan serta analisis atas ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek adalah ukuran yang membandingkan jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan dalam satu tahun dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan angkutan umum memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat perbandingan ketersediaan kendaraan umum terhadap jumlah orang yang dilayani. Rasio ini menjadi salah satu alat penting dalam pengelolaan transportasi, karena data ini menunjukkan tingkat pelayanan transportasi terhadap masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan terkait sektor transportasi di suatu daerah. Tidak ada nilai standar tunggal untuk capaian minimal ini, karena ia ditentukan secara lokal oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi wilayah mereka.

Rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pelayanan transportasi di suatu daerah, dan atau untuk memantau perkembangannya dari tahun ke tahun sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rasio izin trayek adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Izin Trayek} = \frac{\text{Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Atas hal tersebut, maka formulasi Rasio Izin Trayek yang Dinas Perhubungan tetapkan adalah, *“Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk”*. Target Renstra Tahun 2025 adalah sebesar 21,87, s.d. Triwulan II dengan menggunakan data jumlah penduduk per tahun 2025 semester I, terealisasi sebesar 23,48 dengan tingkat capaian 107,36%. Rinciannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Izin Trayek} &= \frac{\text{Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}} \\
 &= \frac{468}{199.350} \\
 &= 23,48
 \end{aligned}$$

Target atas rasio izin trayek pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Rasio Izin Trayek adalah:

- 1) Banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek antara lain disebabkan rendahnya kesadaran, kendaraan melebihi batas teknis usia kendaraan, rute trayek yang sudah tidak aktif.
- 2) Trayek angkutan belum memenuhi semua kebutuhan mobilisasi orang dan barang.
- 3) Pertambahan jumlah penduduk tidak diiringi dengan kenaikan minat Masyarakat menggunakan angkota umum,
- 4) load factor angkota hanya 15,46%.
- 5) Meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum.
- 6) Meningkatkan kesadaran operator layanan angkutan.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Raperda LLAJ untuk mengganti Perda No 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LLAJ yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- 2) Mengidentifikasi karakteristik pola pergerakan transportasi di wilayah Kota Salatiga dan jumlah penduduk potensial yang melakukan pergerakan serta permintaan transportasi.
- 3) Sosialisasi dan pendampingan penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Standar Pelayanan Angkutan Umum.
- 4) Kolaborasi dengan Kepolisian untuk melaksanakan pengawasan administrasi dan teknis termasuk Izin Trayek.

b. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak kendaraan yang dapat dilayani oleh setiap kilometer jalan di suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kendaraan dengan panjang jalan dalam kilometer. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jalan tersebut melayani lebih banyak kendaraan per kilometer, yang bisa

mengindikasikan, memberikan gambaran tentang seberapa padat suatu wilayah dengan kendaraan berdasarkan panjang jalan yang tersedia melalui tingkat penggunaan jalan yang lebih tinggi atau potensi kepadatan lalu lintas.

Rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan jalan dan mengidentifikasi potensi masalah kemacetan di suatu wilayah. Meskipun rasio ini memberikan informasi tentang penggunaan jalan, perlu diingat bahwa rasio ini tidak memperhitungkan bobot jenis kendaraan dan tidak selalu mencerminkan kepadatan lalu lintas secara akurat. Lebih akurat dengan menggunakan pengukuran kinerja lalu lintas.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan pada target ini adalah “Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan”. Dengan menggunakan data panjang jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, dengan data jumlah kendaraan yang berasal dari website Korlantas POLRI pada data per tanggal 14 Juli 2025, target pada tahun 2025 sebesar 24,79%, terealisasi sebesar 19,21% dengan tingkat capaian sebesar 84,29%. Berikut rinciannya:

Rasio Panjang Jalan per
Jumlah Kendaraan

=

Panjang Jalan

Jumlah Kendaraan

=

337,47

175.635

=

19,21

Target atas rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan adalah:

- 1) Batas teknis usia maksimal angkutan umum.

2) Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan atau angkutan berbasis online.

3) Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan tanggung jawab dalam menggunakan kendaraan dan beralih ke angkutan umum.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

2) Meningkatkan minat Masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan subsidi naik angkutan umum.

3) Evaluasi rute jaringan trayek angkutan umum yang terintegrasi.

- 4) Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini untuk menumbuhkan minat menggunakan angkutan umum dan keselamatan berlalu lintas.
- 5) Mendorong koperasi/pengusaha angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum.
- 6) Bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan pelajar agar anak yang dibawah umur (belum memiliki SIM) tidak menggunakan kendaraan pribadi.

c. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum" adalah indikator kinerja yang mengukur proporsi atau persentase kendaraan angkutan umum yang memiliki dan telah melakukan uji KIR (Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor) secara legal. Hasil ini menunjukkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap peraturan uji KIR, yang merupakan tanda kelayakan teknis kendaraan untuk beroperasi di jalan raya, yang diwajibkan oleh pemerintah untuk memastikan keselamatan transportasi.

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian Jumlah Uji KIR Angkutan Umum adalah:

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

=

Pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rumus Pesentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah sebagai berikut:

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

=

Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR pada Tahun n

Jumlah Angkutan Umum pada Tahun n

X 100%

Dinas Perhubungan Kota Salatiga, menentukan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum yang dalam hal ini angkutan perkotaan adalah, *“Jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dibagi total kendaraan angkutan umum yang ada”*. Hal ini diformulasikan untuk mengukur

tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor wajib uji. Standar nasional dari persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji KIR adalah 60%. Tingkat kepemilikan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar angkutan umum yang beroperasi telah teruji kelayakannya, yang berdampak positif pada keselamatan dan kenyamanan.

Pada tahun 2025, Kota Salatiga menetapkan target sebesar 83%, dan sampai dengan triwulan II, berprogres terealisasi sebesar 25% atau dengan tingkat capaian sebesar 30,12%. Masa laik jalan yang berlaku 6 bulan sejak dinyatakan lulus uji, dan baru dinyatakan memiliki KIR ketika dinyatakan lulus uji, menyebabkan capaian persentase kepemilikan KIR secara utuh baru dapat dilihat di akhir tahun, dikarenakan target tersebut merupakan target tahunan, tidak terbagi dalam triwulan. Berikut rincian atas realisasi tersebut:

Persentase
Kepemilikan KIR
Angkutan Umum

=

Jumlah Angkutan Umum yang
Memiliki KIR pada Tahun n

Jumlah Angkutan Umum pada
Tahun n

X 100%

Persentase
Kepemilikan KIR
Angkutan Umum

=

79

316

X 100%

=

25%

Target atas persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif. Beberapa permasalahan perihal Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran kepatuhan para pengusaha angkutan umum untuk melakukan uji KIR.
- 2) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penindakan pelanggaran (*reward and punishment*).
- 3) Terwujudnya sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- 4) Penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Update data administrasi kendaraan Angkutan Umum.
- 2) Membuat SMS Gateway untuk mengingatkan waktu pelaksanaan Uji KIR Angkutan Umum.
- 3) Kolaborasi dengan Kepolisian untuk melaksanakan pengawasan masa berlaku Uji KIR.

- 4) Kolaborasi dengan Organda, paguyuban angkota untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas.
- 5) Peremajaan, Pemeliharaan, dan kalibrasi alat uji untuk meningkatkan pelayanan dan keakuratan hasil uji.

d. Rasio Konektivitas Kota

Rasio Konektivitas Kota adalah suatu ukuran tingkat aksesibilitas dan keterhubungan antara berbagai wilayah di dalam sebuah kota atau antar kota, yang mengukur seberapa mudah masyarakat dan barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lain. Pengukuran ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti jumlah trayek transportasi yang dilayani dan jarak tempuh dibandingkan dengan jarak yang optimal, serta mencakup berbagai moda transportasi.

Hal ini untuk mengukur efisiensi transportasi dengan menilai seberapa baik jaringan transportasi kota dalam menghubungkan berbagai area, menilai aksesibilitas dengan memastikan bahwa berbagai bagian kota dapat dijangkau dengan mudah, dan merencanakan Pembangunan dengan menjadi dasar untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik di masa depan.

Rasio konektivitas kota berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kota yang terhubung dengan baik akan memudahkan pergerakan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup, aksesibilitas yang baik memungkinkan masyarakat untuk menjangkau tempat kerja, layanan publik, dan fasilitas lainnya dengan mudah, serta berperan dalam hal integrasi wilayah, yaitu membantu menciptakan integrasi yang lebih baik antar wilayah, baik di dalam kota maupun secara lebih luas.

Jika dikaitkan dengan melalui pendekatan PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, menggunakan rumus presentase Pelayanan Angkutan Jalan dengan target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 75%. Perhitungan menggunakan jaringan jalan mengacu referensi yang digunakan pada perhitungan rasio konektivitas Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Rasio Konektivitas Kota menggunakan formulasi sesuai dengan petunjuk teknis pada penyusunan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), yaitu:

$$\text{Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota} = \frac{(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut}}$$

dengan ketentuan:

- 2) IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);
- 3) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)
- 4) Bobot Trayek atau Lintas :
 - a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1;
 - b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8;
 - c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5
- 5) Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - a) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
 - b) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
 - c) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
 - d) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Maka, hasil perhitungan Rasio Konektivitas Kota Salatiga:

$$\begin{aligned} \text{IK1 (Angkutan Jalan)} &= \frac{(\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut).} \\ &= \frac{(15 \times 1)}{17} \\ &= 0,88235 \end{aligned}$$

$$\text{IK2} = \frac{(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas})}{\text{dibagi}}$$

(Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)	(Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)
	= $(0 \times 0) / 0$
	= 0

sehingga,

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	= $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$
	= $(IK1 \times 0) + (IK2 \times 0)$
	= $(0,88235 \times 1) + (0 \times 0)$
	= $0,88235 + 0$
	= 0,88

Hal ini dihitung berdasarkan kondisi jumlah trayek yang dioperasikan sebanyak 15 trayek dari 17 trayek yang ditetapkan sesuai SK Wali Kota Nomor 551.2/249/2005 Tahun 2005 tentang Trayek, Route dan Kebutuhan Angkutan Kota di Wilayah Kota Salatiga, dan data angkutan kota yang beroperasi, dan sampai dengan sekarang ini, belum adanya perubahan atas trayek tersebut. Tahun 2025 ini adalah sebesar berada di 0.88, s.d. triwulan II, terealisasi sebesar 0.88, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Target atas Rasio Konektivitas Kota pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif dengan nilai maksimal adalah 1.

e. Kinerja Lalu Lintas Kota

Undang-undang UU Nomor 2 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 36 sebagai landasan untuk melaksanakan evaluasi pada ruas jalan. Hal ini sebagai dasar pengawasan ruas jalan kota yang dimaksudkan guna memberikan pelayanan kinerja ruas jalan yang baik. Kinerja lalu lintas kota adalah kemampuan suatu ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas yang diukur dari tingkat pelayanan, kapasitas, dan derajat kejenuhan, serta dapat dievaluasi menggunakan metode seperti MKJI 1997 (atau sekarang PKJI 2014) yang mengacu pada standar tingkat pelayanan jalan. Parameter yang diukur meliputi arus, kecepatan, kepadatan, dan volume lalu lintas untuk menentukan tingkat pelayanan jalan, yang berkisar dari kondisi bebas hambatan hingga macet.

Untuk menilai kinerja lalu lintas, beberapa parameter utama digunakan:

1) Arus Lalu Lintas

Jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu dalam satuan waktu, diukur dalam kendaraan ringan (skr/jam) setelah dikonversi dari ekivalensi kendaraan ringan.

2) Kecepatan

Kecepatan rata-rata kendaraan yang dipengaruhi oleh arus dan kondisi jalan.

3) Kepadatan

Jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas jalan dalam satuan panjang.

4) Volume

Jumlah total kendaraan yang melalui suatu ruas jalan.

Tingkat pelayanan jalan diukur berdasarkan kinerja lalu lintas sering digambarkan dengan tingkat pelayanan (Level of Service/LoS), yang menunjukkan kondisi aliran lalu lintas sebagai berikut:

Tabel Tingkat Pelayanan Jalan

V/C Ratio	Level of Service (LoS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
0,00 – 0,19	A	Arus lancar, volume rendah, kecepatan tinggi. Bebas dan cepat, kendaraan menentukan kecepatannya
0,20 – 0 44	B	Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume sesuai untuk jalan kota. Hambatan kecil, kondisi stabil.
0,45 – 0,74	C	Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume sesuai untuk jalan kota. Sedikit pembatasan manuver.
0,75 – 0,84	D	Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah. Terkadang harus memperlambat kecepatan.
0,85 – 1	E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah. Volume padat mendekati. Sangat tidak stabil, sering terjadi kemacetan.
> 1	F	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas. Macet total.

Pengukuran kinerja lalu lintas jalan diatur dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan PERMEN PUPR No 11/PRT/M/2010 tentang pedoman penyelenggaraan jalan kolektor perkotaan.

Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga:

Kinerja Lalu Lintas Kota
Salatiga

=

V/C Rasio Ruas Jalan
Jumlah Jalan yang Disurvei

V/C rasio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Berikut ini adalah rincian V/C Ratio di Jalan Kota Salatiga:

Tabel Kepadatan Lalu Lintas Kota Salatiga

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Volume (smp/ jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LoS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sidomukti	1	Jalan Abdul Wahid	749.02	344.4	1301	0.26	B
	2	Jalan Tentara Pelajar	401.78	640	2827	0.23	B
	3	Jalan Parikesit	960.5	269.4	2480	0.11	A
	4	Jalan Yudistira	456.84	445.7	2157	0.21	B
	5	Jalan Semeru	264.63	588.9	2338	0.25	B
	6	Jalan Tanjung	215.64	171.7	1301	0.13	A
	7	Jalan Bima	721.41	182.3	2089	0.09	A
	8	Jalan Bisma	1231.14	208.2	1301	0.16	A
	9	Jalan Hassanudin	2990.5	918	2558	0.36	B
	10	Jalan Nakula Sadewa	935.3	779.5	2401	0.32	B
Tingkir	1	Jalan Marditomo	1.95	519	1389	0.37	B
	2	Jalan Nanggulan	0.93	1016.8	2323	0.44	B
	3	Jalan Nyai Kopek	0.153	77.2	1995	0.08	A
	4	Jalan Buk Suling	0.383	1136.3	1862	0.61	C
	5	Jalan Butuh	0.354	810.8	2422	0.335	B
	6	Jalan Taman Pahlawan	0.288	1104.4	2068	0.534	C
	7	Jalan Dr. Muwardi	1.074	1314	2648	0.5	C
	8	Jalan Tingkir Raya	2.25	1168.6	2157	0.54	C
	9	Jalan Joko Tingkir	1.012	749.9	2480	0.32	B
	10	Jalan Tritis Rejo	0.835	562.6	1301	0.43	B
Sidorejo	1	Jalan Diponegoro	3379.81	2525.5	3329.49	0.76	D
	2	Jalan Imam Bonjol	3039.58	972.6	2323	0.42	B
	3	Jalan Kartini	664.74	865	3223	0.27	B
	4	Jalan Ki Penjawi	1286.97	407.6	1901	0.31	B
	5	Jalan Langensuko	258.09	237.3	1389	0.17	A
	6	Jalan Monginsidi	427.28	273.9	2435	0.22	B
	7	Jalan Pemuda	143.17	997,6	2951	0,34	B
	8	Jalan Prof. Moh. Yamin	389.13	1322.3	3008	0.44	B
	9	Jalan Taman Sari	230.71	263.2	2440	0.11	A
	10	Jalan Yos Sudarso	500.4	392.9	2323	0.17	A
Argomulyo	1	Jalan Abimanyu	3343,89	287,1	1996,2	0,143	A
	2	Jalan Amarta	1800	692,8	1526,56	0,454	C
	3	Jalan Argo Boga 1	600	813,5	1494,08	0,544	C
	4	Jalan Argo Boga 2	150	816	1996,2	0,408	C
	5	Jalan Argo Sari Raya	3778,31	289	2615,71	0,19	B
	6	Jalan Argo Tunggal	574,05	334,6	1301	0,26	B

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Volume (smp/ jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LoS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7	Jalan Argorumekso	1058,35	594,2	1996	0,09	B
	8	Jalan Prumasan 1	290	258	1996	0,13	A
	9	Jalan Prumasan 2	900	256	1996	0,13	A
	10	Jalan Sawo	480,27	963,3	1494,08	0,645	C
Jumlah				23.822	85.132	12.08	
Rata-rata				644	2.128	0.31	B

Sehingga Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga adalah:

Kinerja Lalu Lintas Kota Salatiga

=

V/C Rasio Ruas Jalan

Jumlah Jalan yang Disurvei

=

12,08

40

=

0.302

Rasio Kinerja lalu lintas Kota Salatiga pada target Tahun 2025 ini adalah sebesar berada di 0.31, s.d. triwulan II, terealisasi sebesar 0.31, dengan tingkat capaian sebesar 102,58%. Target tersebut pada periode Renstra 2023-2026 ini bersifat non-kumulatif, dan berindikator dengan sifat negatif, serta dengan nilai maksimal adalah 1.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan pada urusan bidang perhubungan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 ini dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Salatiga, baik dalam kerangka regulasi maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memperhatikan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan tahapan pembahasan dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dapat terintegrasi dengan baik.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 antara lain:

- 1) Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027, telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan beberapa progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan.
- 2) Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan telah memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.
- 3) Dalam penyusunan RKA nantinya, dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya

b. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang merinci program dan kegiatan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Berfungsi sebagai peta jalan operasional, panduan, dan acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga untuk mengimplementasikan program dan kegiatannya secara fokus dan terarah, memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas, serta sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, serta sebagai penajaman atas Rancangan Awal Rencana Kerja atas analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027, berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2025-2029.
- 2) Rencana kerja memuat sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga, program, kegiatan, dan subkegiatan, rencana tingkat capaian (target), pagu indikatif tahun 2026, dan pagu indikatif prakiraan maju 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga, bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program serta menjadi panduan bagi setiap pegawai

dalam menjalankan kebijakan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun rencana tindak Dinas Perhubungan atas Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan semua rumusan yang telah tertuang dalam dokumen Renja 2027, baik program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Tetap terbuka, responsive, dalam menghadapi potensi perubahan atas arah kebijakan maupun kebutuhan Masyarakat, agar dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penajaman Renja 2027 secara internal sebagai bentuk mitigasi risiko atas rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2027 ini disusun, yang merupakan bentuk rinci atas program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, sebagai pedoman, peta jalan operasional, panduan, dan acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam mengimplementasikan program, kegiatan, dan subkegiatannya secara fokus dan terarah, memastikan alokasi anggaran sesuai prioritas, serta sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, serta sebagai penajaman atas Rencana Kerja pemerintah Daerah dan atas analisis kebutuhan yang telah dilakukan.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 /2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan
b. Bab IV : Penutup.



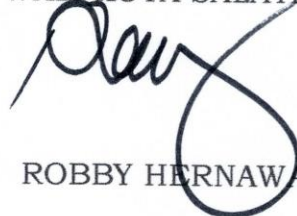
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

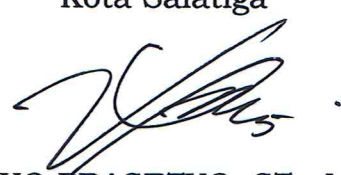
Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 14 Tahun 2026, paling sedikit memuat 6 (enam) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 6. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Salatiga

GUNTUR JUNANTO, S.STP
NIP. 19780605 199711 1 001

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga


JOKO PRASETYO, ST., MT
NIP. 19761023 200502 1 007

Lampiran I:
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja
PD Tahun 2027

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Dinas Perhubungan
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		V		Agar dapat dilampiri dengan SK Tim
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika RENJA 2027
Dinas Perhubungan
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2027 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V		Tambahkan Perwali Nomor 12 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027.
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD		V	Sistematikan disesuaikan menjadi 6 bab, sesuai SE Sekda
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU					
II.1	Evaluasi Capaian Kinerja	Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
II.2	Evaluasi Capaian SPM	Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)		V	Evaluasi capaian SPM 2023-2025 belum ada, mohon ditambahkan
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis	Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis	V		Di naskah renja agar judul disesuaikan dengan judul ini “Permasalahan dan Isu Strategis”

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
II.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD		V	Untuk disesuaikan Pokir DPRD 2027 di Dishub, jika tidak ada dapat diberikan narasi penjelasan
II.5	Usulan Masyarakat	Telaah Usulan Masyarakat		V	Untuk disesuaikan usulan masyarakat 2027 di Dishub, jika tidak ada berikan penjelasan
II.6	Inovasi	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat		V	Belum ada, mohon ditambahkan inovasi di Dishub
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
III.2	Arah Kebijakan	Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya		V	Arah kebijakan belum ada, agar dituangkan dalam sub bab tersendiri, sistematika agar menyesuaikan dengan isi BA ini
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
IV.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-		V	Uraian program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 di Bab IV (sesuai format

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/ Keterangan
			Ada	Tidak	
		2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan			sistematika) disertai usulan pendanaan
IV.2	Tematik	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah)		V	Dukungan program dan kegiatan terhadap kebijakan tematik dituangkan dalam Bab IV. Sistematika agar menyesuaikan dengan isi BA ini
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
V.1	Indikator Kinerja Utama PD	Target keberhasilan pencapaian yang didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		V	Bab V target keberhasilan pencapaian (IKU) belum ada. Mohon dilengkapi. Sesuaikan dengan format sistematika 6 Bab
V.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		V	Bab V target kinerja penyelenggaraan urusan (IKK) belum ada. Mohon dilengkapi. Sesuaikan dengan format sistematika 6 Bab
BAB VI PENUTUP					
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah	V		